

Melusuri Tanah Dayak

CATATAN DARI KALIMANTAN UTARA



Kantor Masyarakat Adat Tidung Tarakan Kalimantan Utara
(Foto: Maria Vaskalina. Dok. Borneo Institute, 2018)



Maria Vaskalina (kanan) dan Destanu (kiri) ketika melakukan kunjungan belajar ke Kalimantan Utara didampingi oleh Yohanes (tengah) dari AMAN setempat.
(Dok. Borneo Institute, 2018).



Suku Dayak Kaltara dalam pakaian adat. Dayak Kaltara sekarang sudah menjadi minoritas di kampung kelahiran sendiri. Dalam kehidupan pun mereka jauh tertinggal dari kelompok mana pun dan sering menjadi obyek permainan, lebih-lebih ketika provinsi ini diserbu secara masif oleh perusahaan-perusahaan besar swasta. Sampai kapan keadaan ini berlangsung dan bagaimana jalan keluar yang dilakukan oleh penyelenggara Negara dari berbagai tingkat? Pertanyaan pokok: Bagaimana Dayak Kaltara itu sendiri bangkit melakukan perubahan maju? Barangkali di sini terletak peran Perhimpunan Dayak Internasional.

Menelusuri Tanah Dayak:

KE KALIMANTAN UTARA

Dayak Yang Eksotis dan Senilai Berapa?

Catatan Maria Vaskalina *

Sejak Orde Baru (Orba) hingga akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) konsep pembangunan yang diterapkan di negeri ini lebih bersifat top-down dengan mengabaikan prinsip-prinsip free, prior, informed and consent (FPIC), kemerdekaan, diutamakan, kejelasan dan kesetujuan, prinsip umum yang berupaya menegakkan partisipasi dari bawah warga Masyarakat Adat dalam mengawasi kegiatan-kegiatan pembangunan ketika hendak menggunakan tanah-tanah di wilayah Masyarakat Adat.

Pengabaian ini mengakibatkan pembangunan dilakukan sesuai keinginan dari penyelenggara Negara (top-down approach) mengabaikan pemberdayaan (empowerment) yang sesungguhnya merupakan dasar bagi pembangunan yang solid dan tanggap keadaan. Pendekatan top-down yang selama ini dipilih dan diterapkan memang adalah suatu pendekatan lebih mudah dibandingkan pendekatan bottom-up yang partisipatif berdasarkan prinsip-prinsip FPIC lebih banyak memperlihatkan kegagalannya.

Warga Masyarakat Adat dan akar rumput hanya dijadikan obyek dan sering diperlakukan sewenang-wenang serta telah banyak menimbulkan kerusakan-kerusakan lebih-lebih kerusakan budaya, pola pikir dan mentalitas. Pendekatan pemberdayaan pada intinya terketak pada pertanyaan bagaimana warga masyarakat menjadi aktor pemberdayaan diri mereka sendiri sehingga apa yang dibangun menjadi tanggap keadaan dan keperluan serta apresiatif. Untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang sadar secara ideologis atau pemikiran dan mempunyai ketrampilan (skill know how) yang berkualitas tinggi dan terus meningkat sesuai gerak sebuah spiral.

Guna mencapai tujuan ini pendidikan penyadaran melalui berbagai kegiatan baik usaha-usaha produktif maupun yang edukatif merupakan masalah kunci. Hasil kongkret usaha-usaha produktif, lebih-lebih berjangka pendek, akan membantu peningkatan kesadaran yang kemudian pada gilirannya akan berdampak balik pada kegiatan-kegiatan yang meningkatkan instensitas usaha-usaha produktif.

Usaha-usaha produktif dimaksudkan untuk menanggulangi masalah-masalah kehidupan sehari-hari terutama pangan, yang saya namakan masalah "perut" -- masalah yang tidak pernah mempunyai kesabaran untuk menunggu.

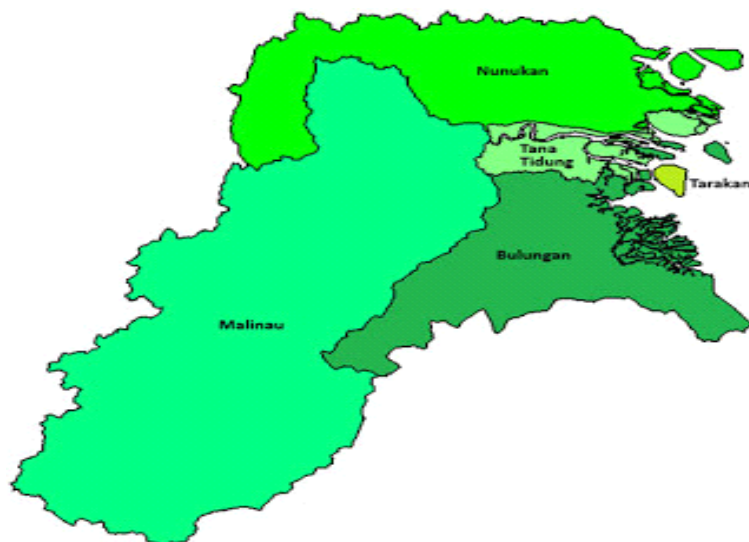
Usaha produktif dan kesadaran tidak bisa dipisah-pisahkan dalam kegiatan pemberdayaan. Sampai saat ini, pembangunan yang berlangsung, baik yang dilakukan oleh penyelenggara Negara maupun oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) belum menyentuh kedua hal tersebut. Padahal salah satu peran utama LSM, sesuai dengan namanya tidak lain membuat masyarakat berdaya, bukan menjadikan ketidakberdayaan masyarakat sebagai komoditas. Guna menunaikan peran tersebut, dari LSM dituntut tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya baik secara pemikiran maupun kemampuan keterampilan atau keahlian. Bagaimana LSM itu bisa melakukan usaha besar mulia pemberdayaan jika secara internal ia tidak memiliki barisan SDM yang berdaya?

Konsep "membangun dari pinggir" pada hakekatnya adalah gagasan yang menggunakan pendekatan bottom up yang jika berhasil dilaksanakan akan mengubah wajah negeri dan atau daerah yang buram menjadi bercahaya.

Dalam usaha membentuk barisan internal yang berdaya ini, Yayasan Borneo Institut (BiT) Palangka Raya menggunakan jejaring kerjanya, telah mengirim staf-stafnya ke berbagai daerah di tanahair maupun ke mancanegara guna menimba pengalaman pemberdayaan, bagaimana memadukannya dengan advokasi legal di daerah-daerah dan

negeri-negeri lain agar tidak perlu melalui proses "trial and error".

Sesuai maksud seperti di atas, dari 3-12 Mei 2018 lalu, saya dan Destanu, Bagian Hukum BiT, berangkat ke Kalimantan Utara (Kaltara), sebuah provinsi termuda di Indonesia, pemekaran dari provinsi Kalimantan Timur, resmi disahkan menjadi provinsi dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2012 berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012.



Kaltara dipilih sebagai daerah kunjungan belajar karena dari berbagai sumber, kami mendengar Peraturan Daerah (Perda) Tentang Masyarakat Adat Kabupaten Malinau menarik untuk dijadikan acuan.

Tanggal 3 Mei 2018 kami memulai perjalanan dengan pesawat dari Palangkaraya menuju Balikpapan sebagai bandara transit untuk kemudian terbang ke Tarakan dan menginap di sana. Belum ada penerbangan langsung dari Palangka Raya ke Tarakan ataupun Tanjung Selor, ibukota Kaltara yang terletak di Kabupaten Bulungan. daratan pulau, Sementara jalan darat selalin terlalu jauh, juga akan terlalu mahal ditambah dengan resiko keselamatan.

Kesokannya pada tanggal 4 Mei 2018, kami baru menyeberang menggunakan ferry ke Tanjung Selor menuju Desa Long Lian Kecamatan Long Peso. Keadaan hubungan antar provinsi di Kalimantan ini memang memperlihatkan suatu ironi. Pernah untuk masa yang panjang untuk ke Pontianak harus terbang ke Jakarta dahulu baru kemudian kembali menyeberang ke Pontianak. Untuk ke Balikpapan pernah harus pergi ke Banjarmasin. Dampak isolasi daerah yang demikian sangat besar terhadap berbagai bidang kehidupan. Menjadi pertanyaan besar, Berapa persen yang didapatkan kembali oleh daerah

penghasil atas pengerukan sumber daya alam mereka? Pembagian hasil yang adil antara Pusat dan daerah patut dipertimbangkan benar jika ingin daerah-daerah bisa membangun. Konsep "membangun dari pinggir" niscayanya memperbaiki keadaan timpang begini.

Setelah perjalanan panjang dan cukup berat, kami tiba sore hari sekitar pukul 6 dan menginap di rumah warga di Long Lian. Malam harinya melakukan diskusi dengan masyarakat yang sedang berjuang untuk mempertahankan hak tanah dan janji plasma yang diberikan oleh perusahaan.

Provinsi Kaltara yang mempunyai total luas sebesar 75467,70 km², pada tahun 2016 berpenduduk sejumlah 666333 jiwa. Hampir 40 persen dari jumlah total penduduk tersebut adalah Suku Jawa yang datang ke daerah ini melalui program transmigrasi, merupakan kelompok terbesar, disusul penduduk asal Sulawesi Selatan. Selebihnya merupakan penduduk asli Kalimantan yaitu Suku Dayak (Lun Bawang/Lun Dayeh, Kenyah, Murut --sebagian terdapat di Negara Bagian Sabah, Malaysia Timur), Suku Banjar, Suku Bulungan, Suku Tidung dan Suku Kutai.

Hubungan antar etnis yang majemuk ini tidak selalu harmonis, apalagi ketika penyakit kepongahan "besarisme" (mayoritas-isme) mulai berkembang menjadi virus yang membahayakan kedamaian bahkan bisa mematikan. Sebagai contoh adalah Keresahan Tarakan pada 26 September 2010 yang memakan korban 6 jiwa melayang dan 30.000 orang harus mengungsi. [<https://justnurman.wordpress.com/2010/09/30/konflik-tarakan-30-000-warga-mengungsi-6-rang-tewas/>].

Pihak kepolisian memang menyebut Tragedi Tarakan adalah peristiwa yang bersifat "murni kriminal", tapi kalau mau jujur mengevaluasinya barangkali penilaian demikian lebih bersifat taktis guna mencegah meluasnya konflik, jauh dari sebab hakiki. Sebab virus kepongahan "besarisme" di sisi lain ia akan mengembangkan ghettoisme budaya dan budaya ghetto yang merondap nilai-nilai republikan dan berkeindonesiaan serta politik budaya bhnneka tunggal ika.

Di pihak lain, pandangan dan sikap "besarisme" cepat atau lambat akan mengembangkan kolonialisme internal yang membahayakan keutuhan Indonesia baik sebagai bangsa maupun sebagai Negara.

Balkanisasi tidak terelakkan akan berkembang. Padahal jika kita menyelami filosofi budaya mayoritas etnik-etnik di negeri ini, toleransi, keterbukaan merupakan seutas

benang merah yang menelusuri budaya-budaya tersebut. Sehubungan dengan ini, saya bertanya-tanya apakah tidak ada baiknya jika perguruan tinggi-perguruan tinggi dan universitas-universitas di berbagai daerah membuka jurusan sejarah dan antropologi yang kegunaannya sangat langsung lebih-lebih untuk Indonesia yang majemuk.



Tragedi Tarakan September 2010 (Foto.Dok. Radar Tarakan, 2010)

Dengan komposisi demografis yang demikian, bahasa Indonesia merupakan bahasa pergaulan sehari-hari karena suku Tidung dan Dayak pada kenyataannya sudah merupakan minoritas.

Lalu bagaimana dengan Bahasa dan Budaya Dayak Kaltara? Saya tidak mengetahui apakah dalam matapelajaran muatan lokal bahasa dan budaya Dayak masuk menjadi salah satu isinya.

Hanya saja, kalau dilihat dari tingkat pendidikan rata-rata yang tidak tinggi di kalangan Orang Dayak transfer bahasa dan budaya masih dilakukan secara tradisional yaitu dari mulut ke mulut. alias dengan metode lisan. Yang lebih memilukan Orang Tidung tidak mengakui diri sebagai Orang Dayak yang mayoritas Islam tidak mengakui diri sebagai Orang Dayak tapi Tidung.

Dayak dipandang sebagai segala yang berbau mistis. Hanya saja ketika Tragedi Tarakan tahun September 2010 meletus, Orang Tidung yang tidak mengakui diri sebagai Dayak itu tiba-tiba menyatakan diri Dayak dan minta solidaritas pada Dayak-Dayak di provinsi-provinsi lain, termasuk dari Dayak Kalimantan Tengah (Kalteng).

Pengingkaran diri secara sukarela begini memang umum terjadi di daerah-daerah Kalimantan Indonesia lainnya sebelum tahun 1992, tahun berlangsungnya Konferensi Internasional Dayak di Pontianak. Setelah tahun 1992, perubahan drastis terjadi.

Apa arti pengingkaran diri ini?

Dilihat dari segi pengingkaran diri ini maka Tidung berada jauh di belakang paling tidak seperempat abad, persisnya 26 tahun. Pengingkaran diri secara sukarela selain merupakan bentuk bunuh diri budaya secara kolektif juga memperlihatkan lemahnya pertahanan budaya. Wujud dari kelemahan pertahanan budaya ini, misalnya enggan menggunakan Bahasa Dayak termasuk dalam keluarga inti, memandang budaya Dayak sebagai budaya "setan", sebagai budaya tidak zamani, budaya semasa Zaman Siti Nurbaya, memandang kegiatan kebudayaan hanya membuang-buang uang, dst. dsb...

Yang turut memperlemah pertahanan budaya ini adalah tidak adanya penelitian dan kajian sungguh-sungguh tentang sejarah dan budaya Dayak sehingga jika Orang Dayak, dari tingkat dan kalangan manapun, ketika berbicara tentang Dayak, yang dibicarakan sebatas pembicaraan tentang kulit luar. Ada keterputusan sejarah dan budaya di kalangan masyarakat Dayak di mana pun. yang kemudian melahirkan berbagai kecenderungan. Kelemahan pertahanan budaya inilah yang menjadi salah satu musabab utama terpinggirnya Orang Dayak.

Jika terdapat pengingkaran diri, apakah mungkin bahasa dan budaya Dayak dijadikan salah satu isi dari matapelajaran lokal -- yang di Kalteng sendiri keadaannya belum ideal. Yang ironi adalah bahwa Dayak Kaltara dan Kaltim yang eksotis lebih banyak dijadikan promosi turisme daerah belaka. Apakah hanya sebegitu harga dan nilai Dayak? Apakah Dayak akhirnya tidak lebih dari suatu komoditas?

Perubahan maju apakah yang akan terjadi, terutama untuk minoritas Dayak, dengan posisi Kaltara sebagai provinsi ke-34? Apakah Dayak Kaltara akan menjadi berkembang maju ataukah sebaliknya masuk dalam lubang keterpurukan yang lebih buruk dari masa silam, makin kehilangan diri oleh ketertinggalan menyeluruh yang dimanfaatkan maksimal oleh pemilik kapital dan kekuasaan.

Untuk itu ketertinggalan perlu dipertahankan. Tanpa gerakan untuk perubahan maju, terutama dari internal Dayak itu sendiri, saya khawatir, apa yang dilukiskan penyair Perancis Arthur Rimbaud (1854-1861) akan terjadi. Rimbaud pada waktu itu menulis dalam puisi "Si Miskin Melamun" antara lain: *"Sebab kehilangan melulu! / Dan jika aku*

kembali/Jadi kelana yang dulu/Tidak bakal lagi terbuka/Pondok hijau itu bagiku."

Sampai hari ini sejarah Dayak boleh dikatakan sejarah "kehilangan melulu". Jika berlanjut terus maka "Pondok hijau", pondok hijau kemajuan itu tidak bakal ada.

Tanggal 6 dan 7 Mei 2018 kami meninggalkan desa Long Kian menuju ibukota Kaltara Tanjung Selor untuk menjumpai anggota DPRD guna mendapatkan informasi-informasi tentang Kaltara, terutama penyusunan Perda Tentang Masyarakat Adat.[]

** Maria Vaskalina, Borneo Institute Community Officer, Palangka Raya.*